

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA PENGEMBANGAN DESA WISATA DI KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT

DARTO

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Padjadjaran

Sebagai daerah otonomi baru Kabupaten Pangandaran memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan sekaligus tantangan berat untuk menciptakan manajerial pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah otonomi baru itu memberikan pondasi awal yang sangat penting dan menentukan terhadap keberlanjutan dan keberhasilan serta kemajuan Kabupaten Pangandaran di masa yang akan datang. Kesalahan awal dalam melangkah akan berakibat fatal ke depannya. Karena untuk memperbaiki kekeliruan itu akan membutuhkan biaya tinggi (*hight cost*). Oleh karena itu pondasi awal ini memiliki nilai strategis yang paling utama dalam pembangunan Kabupaten Pangandaran secara berkesinambungan.

Untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran sesungguhnya sudah memiliki potensi yang memadai yang tersebar di setiap wilayah Kabupaten Pangandaran. Potensi tersebut terutama adalah bidang pariwisata yang salah satunya adalah desa wisata. Potensi desa wisata khususnya di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran perlu mendapat pengembangan dan pemberdayaan guna memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut.

Metode yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan pengembangan desa wisata ini berupa : sosialisasi kepada pihak pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat; pendataan potensi desa wisata di wilayah Kecamatan Cijulang yang belum tergali secara maksimal; pendampingan kepada masyarakat untuk lebih mendapatkan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat di Kecamatan Cijulang.

Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran sangat antusias dalam membentuk dan mengembangkan desa wisata terlihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung program desa wisata, misalnya dengan mengikuti pelatihan, studi banding, dan lain - lain. Namun permasalahan fasilitas sarana dan prasarana masih merupakan kendala pokok untuk menarik minat wisatawan.

**Keywords :** Pemberdayaan, Potensi Desa, Desa Wisata

## PENDAHULUAN

Berbagai kebijakan dalam pembangunan desa selama ini seperti Bantuan Dana Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan (PDBPDK), Program Pengembangan Kecamatan (PPK), PNPM Mandiri Desa Wisata dan program lainnya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan mengurangi kesenjangan belum mampu mengatasi persoalan secara menyeluruh (Supriatna, 2000 : 22). Berbagai bimbingan, pembinaan dan bantuan dana dan fasilitas disalurkan pemerintah untuk meningkatkan partisipasi dan kemandirian dalam pembangunan.

Berbagai program bantuan pemerintah yang mengalir ke desa belum mampu mengangkat harkat hidup masyarakat desa, memerangi kemiskinan desa, mencegah urbanisasi, menyediakan lapangan kerja. Yang terjadi adalah ketergantungan, konservatisme dan pragmatisme masyarakat desa terhadap bantuan pemerintah (Eko, 2004 : 290). Kegagalan program pemerintah tersebut disebabkan oleh banyak hal, dari mulai strategi dan pendekatan yang keliru sampai pada pengelolaan program yang belum berjalan optimal.

Pemerintah dalam upaya mengatasi kemiskinan di Indonesia salah satunya dengan meningkatkan kepariwisataan melalui PP No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2010 - 2025 . Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam menindaklanjuti Peraturan tersebut meluncurkan program penanggulangan kemiskinan melalui desa wisata. (PNPM Mandiri wisata) .

Dalam PerMenKebudayaan dan Pariwisata No. KM 18 /HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata yang menyebutkan bahwa:

1. PNPM Mandiri Pariwisata adalah bagian dari PNPM Mandiri yang pelaksanaannya melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dan pemberian bantuan langsung masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dengan pembangunan kepariwisataan di desa, desa di sekitar daya tarik wisata dan desa di sekitar usaha wisata.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan /meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara individu maupun kelompok dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya.
3. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara straksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.

Kegiatan Desa wisata difokuskan pada pengembangan wilayah sasaran yang memiliki keterkaitan fungsi dan pengaruh dengan unsur daya tarik wisata berupa keanekaragaman alam, budaya dan hasil buatan manusia ,maupun fasilitas usaha pariwisata dan industri kreatif yang menjadi pennggerak aktivitas kepariwisataan di desa wisata.

Dalam skala yang lebih luas PNPM Mandiri adalah peningkatkan kemampuan menciptakan lapangan kerja dan usaha masyarakat di bidang pariwisata yang secara khusus dijabarkan dalam :

1. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, keswadayaan setempat, dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya melalui usaha kepariwisataan
2. Meningkatkan kemampuan kreatifitas masyarakat seperti kesadaran kritis, potensi sosial budaya serta kearifan lokal untuk pemberdayaan dimiliki

- sendiri
3. Meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan pembangunan kepariwisataan yang terintegrasi dan berbasis masyarakat
  4. Membangun kemitraan lintas sektor untuk melakukan akselerasi pembangunan kepariwisataan di wilayah binaan. (Permendbudpar No. KM.18/HM/001/MKP/2011)

### PERMASALAHAN MITRA

Kabupaten Pangandaran telah menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Cijulang menjadi salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Pangandaran yang saat ini tengah melakukan pembenahan dan pengembangan, salah satunya di sektor pariwisata yang didalamnya memiliki keunggulan seperti sumberdaya alam yang indah, lokasi geografis yang mudah diakses, keragaman hayati, keragaman hasil kerajinan yang terus berkembang.

Dalam konteks PNPM Desa wisata, pemerintahan kecamatan dan desa memiliki peranan penting sebagai ujung tombak dalam pemberian pelayanan dan menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan menciptakan suasana kehidupan sosial ekonomi maupun religi yang lebih baik. Peranan yang semakin penting ini menuntut suatu perubahan dari segi pola kerja, struktur dan fungsi maupun hubungan kelembagaan baik yang bersifat vertikal (dengan pemerintah tingkat atasnya) maupun secara horizontal (melalui hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya) Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 setidaknya membawa angin segar serta harapan sehingga semangat otonomi daerah dan desentralisasi dalam lingkungan pemerintahan maupun masyarakat

semakin menguat.

Hal tersebut diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang disebutkan dalam salah satu pasalnya : “Dalam pasal 78 ayat 1-3 dikatakan bahwa pembangunan desa bertujuan selain meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.”

Di bagian lain disebutkan pula bahwa “Pemberdayaan Masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran. Serta pemanfaatan sunberyadaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. (Pasal 1, ayat 12 UU No. 6/2014, tentang Desa).

Dalam pengembangan desa wisata ada beberapa persoalan yang nampaknya memerlukan perhatian di lapangan, diantaranya :

1. Masih rendahnya keswadayaan dan kemandirian masyarakat desa dalam membangun, memanfaatkan dan memelihara prasarana dan sarana infra struktur desa wisata . Hal ini disebabkan karena pola pembinaan dan penanganan program tanpa banyak melibatkan swadaya masyarakat. Fenomena tersebut memperlihatkan indikasi bahwa upaya pembinaan dan penanganan program belum berhasil memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.
2. Sistem perencanaan dari bawah yang kurang terpadu , kurang memunculkan partisipasi dan keswadayaan sebagai inti

pemberdayaan masyarakat, sehingga program dirancang cenderung masih bersifat *top down policy*. Perubahan kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata belum diikuti perubahan sikap dan perilaku yang konusif dalam berusaha.

3. Perkembangan usaha ekonomi masyarakat dalam desa wisata belum optimal, karena terbatasnya akses masyarakat pada sumber-sumber produksi. Penggunaan teknologi tepat guna dalam berbagai usaha masih sulit diadaptasi, hal ini berkaitan dengan produktifitas, kreativitas dan nilai tambah produk hasil usaha masyarakat yang relatif belum tergal, sehingga berimplikasi pada pendapatan atau daya beli masyarakat.
4. Berbagai program pemberdayaan desa melalui PNPM belum terpadu dan manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Program pembangunan desa cenderung bersifat rutin belum banyak menyentuh aspek outcome/hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Hal ini disebabkan berbagai program termasuk PNPM Desa Wisata yang direncanakan dan dilaksanakan lebih berorientasi pada pemenuhan *target group* jangka pendek dan kurang mengenai sasaran, dengan kata lain "Pelayanan dan bantuan pemerintah kurang sampai menjangkau mereka". (Chambers, 1988 : 146). Kemudian adanya berbagai kepentingan lembaga yang terlibat dalam pembinaan, pemberian bantuan maupun yang mengelola menimbulkan konflik yang bersifat kontra produktif, seperti dalam penataan PKL dan sebagainya. Hal ini berimplikasi terhadap keberdayaan dan dukungan masyarakat. Padahal dengan semakin kompleksnya persoalan dengan berbagai program pembangunan termasuk pengembangan desa wisata akan sekaligus menjadi tantangan dan peluang

bagaimana agar desa wisata yang direncanakan, diimplementasikan mampu menjadi salah satu penggerak dalam pembangunan yang berkelanjutan.

## SOLUSI YANG DITAWARKAN

Sejalan dengan pemikiran tersebut, kebijakan otonomi daerah, sesungguhnya merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan transformasi sosial di berbagai tingkatan. Namun perubahan yang tengah berlangsung baik di tingkat nasional hingga tingkat desa, belum didukung oleh langkah-langkah strategi dan operasional secara komprehensif. Perubahan yang terjadi masih cenderung bersifat dipermukaan saja, belum menyentuh pada perubahan perspektif, sikap, perilaku dan peran yang signifikan dari lembaga-lembaga desa maupun masyarakat perdesaan.

Adapun upaya ke arah yang kondusif bisa dilakukan dengan teknik penggerakkan dan membangkitkan partisipasi masyarakat sesuai dengan persoalan di lapangan. Hal ini bisa dilakukan melalui teknik :

1. Teknik komunikasi yang tepat melalui bentuk penyuluhan, sosialisasi, forum dialog dengan menghadirkan nara sumber.
2. Teknik memberi fasilitas. Artinya bagaimana upaya memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh sumberdaya yang diperlukan. Misalnya bagaimana menata dan mengembangkan penyediaan tempat usaha, akses terhadap sumberdaya financial dan dalam suasana keterbukaan.
3. Teknik persuasi. Teknik persuasi dimaksudkan kita memahami dan ikut merasakan apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi serta memberi alternatif jalan keluar yang terbaik dalam pengembangan desa wisata. Teknis persuasi bisa juga dalam bentuk pertemuan/konsultasi, dan bentuk tertulis surat edaran, surat tugas pada

waktu yang tepat dan cepat.

4. Melakukan *check and re-check* terhadap setiap pelaksanaan kegiatan untuk memonitor, mengkonfirmasi atau memantau sudah sampai mana program yang dilaksanakan sesuai sasaran target yang sudah ditentukan.

Adapun Partisipasi Masyarakat dalam pengembangan desa wisata, dibangun dengan upaya :

1. Membangun kesediaan dari warga masyarakat untuk mau melakukan tugas, fungsi secara bertanggungjawab.
2. Dapat mematuhi, mentaati setiap peraturan dan hasil musyawarah yang telah disepakati dalam pengembangan desa wisata sesuai program-program dan kebijakan yang telah direncanakan.
3. Untuk mengeliminir daya resistensi (konflik) pada seseorang / kelompok tertentu, dengan menanamkan, memelihara rasa pengabdian dan tanggungjawab bagi kepentingan publik yang lebih luas.

Metode pemecahan masalah tersebut melalui penyuluhan pengembangan desa wisata ini berupa :

1. Diawali dengan sosialisasi kepada camat dan lurah / kepala desa se Kecamatan Cijulang, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, aparat kewilayahan, masyarakat, pembinaan tim kerja, penyuluhan baik langsung maupun melalui media.
2. Pendataan potensi desa wisata di wilayah Kecamatan Cijulang yang belum tergali secara maksimal.
3. Pendampingan kepada masyarakat dan desa wisata untuk lebih mendapatkan pembinaan secara berkesinambungan dan memberikan dampak yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dan desa di Kecamatan Cijulang.

## TARGET KELUARAN

Dari solusi yang ditawarkan bagi permasalahan mengenai desa wisata di Kecamatan Cijulang, kami melihat beberapa aspek positif dari berlangsungnya kegiatan ini, yaitu:

1. Adanya sosialisasi kepada camat dan lurah / kepala desa se Kecamatan Cijulang, tokoh masyarakat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat, aparat kewilayahan, masyarakat akan menumbuhkan kembali rasa tanggung jawab bagi aparat pemerintahan dan meningkatkan animo serta kesadaran masyarakat akan pentingnya mengmebangkan desa wisata.
2. Dengan adanya pendataan potensi desa wisata di wilayah Kecamatan Cijulang akan memberikan kejelasan gambaran kekuatan potensi ekonomis wilayah tersebut.
3. Pendampingan kepada masyarakat dan desa di Kecamatan Cijulang dapat meningkatkan pola pembinaan dan jumlah kunjungan yang lebih banyak sebagai desa destinasi wisata.

## HASIL YANG DICAPAI

Kabupaten Pangandaran adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Parigi. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar di utara, Kabupaten Cilacap di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Kabupaten Tasikmalaya di barat. Kabupaten Pangandaran secara geografis berada pada koordinat 108° 41' - 109° Bujur Timur dan 07° 41' - 07° 50' Lintang Selatan memiliki luas wilayah mencapai 61 km<sup>2</sup> dengan luas laut dan pantai dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kabupaten Ciamis dan Kota Banjarsari

Sebelah Barat : Kecamatan Parigi

Sebelah Timur : Kabupaten Cilacap  
Sebelah Selatan : Samudera Hindia  
Kabupaten Pangandaran terdiri atas 10 kecamatan yang terdiri atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di kecamatan Parigi. Kabupaten Pangandaran merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini resmi dimekarkan pada 25 Oktober 2012. Kabupaten ini terdiri dari 10 kecamatan, yaitu sebagai berikut :

1. Cigugur
2. Cijulang
3. Cimerak
4. Kalipucang
5. Langkaplancar
6. Mangunjaya
7. Padaherang
8. Pangandaran
9. Parigi
10. Sidamulih

Wilayah Kabupaten Pangandaran yang luas, seringkali membuat masyarakat kesulitan mengakses berbagai pelayanan pemerintah. Hal yang dikeluhkan oleh masyarakat tersebut disebabkan karena informasi mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak tersosialisasi dengan baik. Dampak dari kondisi ini menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan juga pemenuhan kebutuhan layanan masyarakat itu sendiri.

Kabupaten Pangandaran yang sangat luas ini memiliki potensi wisata yang sangat banyak juga salah satunya di Kecamatan Cijulang. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini kami melakukan penyuluhan dengan metode tatap muka langsung dengan memberikan arahan dan sosialisasi yang bersifat dua arah yang secara penuh melibatkan partisipasi aktif peserta yang hadir untuk mendalami dan penggalan potensi wisata yang ada di masyarakat tersebut. Peserta yang hadir memiliki

antusiasme yang tinggi dalam membentuk dan mengembangkan desa wisata karena disadari bahwa potensi utama masyarakat setempat yang bisa digali secara maksimal adalah wisata alam.

Di Pangandaran pada umumnya terkait dengan wisata bisa dilihat dari dua aspek yaitu :

1. Destinasi Wisata
2. Sarana Wisata

Destinasi Wisata terdiri dari : pantai, sungai, goa, desa wisata, konservasi. Sedangkan Sarana Wisata terdiri dari : wisata kuliner, wisata budaya, wisata alam, agen perjalanan, hotel dan penginapan.

Dalam kegiatan pemberdayaan ini penyuluhan atau juga bisa *sharing information* dan sosialisasi khususnya untuk Destinasi Wisata berupa Desa Wisata. Desa wisata ini juga mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran misalnya nampak dengan dibentuknya Asosiasi Desa Wisata (*Village Tourism Association*). Asosiasi ini memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut :

### 1. Visi

Terwujudnya Kabupaten Pariwisata Pangandaran Dengan Memiliki Desa – Desa Wisata yang Maju, Mandiri dan Profesional ditunjang oleh Masyarakat yang Beriman, Agamis, Demokratis dan Berwawasan Lingkungan.

### 2. Misi

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Pariwisata Pangandaran yang Maju, Mandiri dan Profesional;
- b. Mengembangkan dan memanfaatkan Potensi Wisata, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Pariwisata Pangandaran;

- c. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pariwisata Pangandaran.

### 3. Tujuan

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pariwisata Pangandaran;
- b. Meningkatkan kerukunan hidup yang dilandasi nilai-nilai religi dan demokrasi;
- c. Menjaga kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam baik Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui maupun Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui;
- d. Menjadikan Desa Wisata sebagai daerah tujuan wisatawan domestik dan mancanegara;
- e. Meningkatkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) dibidang Pendidikan, Kesehatan dan Daya Beli;
- f. Meningkatkan rasa kebersamaan dan melestarikan budaya gotong royong.

Adapun pengembangan atraksi wisata di Desa Wisata Kabupaten Pangandaran terdiri dari :

- a. Wisata Alam
- b. Wisata Budaya
- c. Wisata Agro
- d. Wisata Religi
- e. Wisata Edukasi
- f. Wisata Bahari

Selain itu upaya pengembangan dan pembinaan desa wisata dilakukan juga melalui berbagai pelatihan yang digelar oleh *Local Working Group* (LWG). LWG adalah kelompok kerja lokal yang fokus terhadap pengembangan kepariwisataan dengan dukungan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan United Nations Development Program (UNDP).

Di wilayah Kecamatan Cijulang memiliki tujuh desa, yaitu :

- a. Batukaras
- b. Ciakar
- c. Cibanten
- d. Cijulang
- e. Kertayasa
- f. Kondangajar
- g. Margacinta

Visi Kecamatan Cijulang adalah sebagai berikut :

“Dengan sinergitas Ulama Dan Umaro, Kecamatan Cijulang yang Terdepan dalam Agribisnis dan Tujuan Wisata Alternatif Di Pangandaran Tahun 2015”

Misi Kecamatan Cijulang yaitu :

- a. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia
- b. Mewujudkan pengelolaan dan penambahan Sumber Daya Alam (SDA) yang berwawasan lingkungan
- c. Mewujudkan pemerintahan yang baik
- d. Memelihara dan meningkatkan potensi Pariwisata

Di Kecamatan Cijulang wisata alam yang sangat terkenal misalnya *Green Canyon* (Cukang Taneuh), kemudian menyusul saat ini yang masih hangat diperbincangkan karena dituntut manajemen yang lebih baik terutama dari aspek keamanan yaitu wisata alam Citumang.

Desa Margacinta Kecamatan Cijulang juga mengajukan program desa wisata namun belum masuk dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2017. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Parperindagkop dan UMKM Kabupaten Pangandaran, Drs. Muhlis, mengatakan, untuk usulan desa wisata yang diajukan beberapa pemerintahan desa, namun belum masuk ke dalam program nanti bisa ditambahkan. Selanjutnya nanti akan diranking di tingkat kabupaten, terkait skala prioritas dan sesuai kemampuan anggaran. Selain itu

juga Desa Kertayasa pun akan memanfaatkan potensi desa dalam mewujudkan desa wisatanya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Setelah kami melakukan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan desa wisata di Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pangandaran sangat antusias dalam membentuk dan mengembangkan desa wisata terlihat dari partisipasi masyarakat yang tinggi dalam mengikuti berbagai kegiatan yang mendukung program desa wisata, misalnya dengan mengikuti pelatihan, studi banding, dan lain – lain.
- b. Untuk suksesnya program desa wisata juga didukung oleh terbentuknya wadah lembaga yaitu misalnya Asosiasi Desa Wisata (*Village Tourism Association*) Kabupaten Pangandaran. Dan juga kerjasama dengan lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri misalnya dengan United Nations World Tourism Organization (UNWTO) dan United Nations Development Program (UNDP).
- c. Adanya potensi desa wisata yang tinggi khususnya di Kecamatan Cijulang yang sudah berkembang dengan baik maupun yang masih proses pengembangan untuk bisa masuk dalam Rencana Kerja Kabupaten Pangandaran, seperti misalnya Desa Margacinta dan Desa Kertayasa.

### 2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat kami sampaikan antara lain :

- a. Perlu adanya pendampingan yang berkesinambungan dalam

mengembangkan potensi desa wisata melalui lembaga yang sudah ada baik asosiasi formal pemerintah maupun lembaga non formal masyarakat desa.

- b. Semangat gotong royong dan kebersamaan warga masyarakat dalam mengembangkan desa wisatanya perlu dijaga agar tidak terjadi konflik horisontal maupun vertikal yang muncul karena berbagai kepentingan, misalnya melalui dialog terbuka secara berkala dan manajemen yang transparan.
- c. Segala kegiatan yang terkait desa wisata tentunya dikembangkan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan mempertimbangkan pembangunan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Marbun, B.N. 1988. *Proses Pembangunan Desa*. Jakarta : Erlangga
- Nawawi, Hadari. 1995 *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cetakan 6 Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

### 2. Dokumentasi/ Publikasi

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa



Kabupaten Pangandaran. Wikipedia. 2016.

<http://www.pangandarankab.go.id/>

<http://www.harapanrakyat.com/2016/02/duh-usulan-desa-wisata-tak-masuk-renja-pemkab-pangandaran-2017/>

<http://www.harapanrakyat.com/2016/02/usulan-desa-wisata-tak-masuk-renja-ini-kata-dinas-parawisata-pangandaran/>

<http://www.ktna-pangandaran.or.id/category/desa-wisata-2/>

